



## **Pembiayaan Berparadigma *Green Financing* Dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan**

**Yutisa Tri Cahyani\***

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, [yutisa@iainponorogo.ac.id](mailto:yutisa@iainponorogo.ac.id)

---

### **Article Info**

---

**Article history:**

Received June 28, 2024

Revised July 3, 2024

Accepted July 3, 2024

Available online July 3, 2024

---

\*Corresponding author email:

[yutisa@iainponorogo.ac.id](mailto:yutisa@iainponorogo.ac.id)

---

**Keywords:**

Green Economy, Green Financing, Sustainable.

---

### **Abstract**

---

**Introduction:** This study aims to explore the green financing paradigm in the context of Islamic banking and to analyze the implementation of green financing in the Islamic banking sector in Indonesia. The green financing paradigm refers to a financial approach that considers aspects of environmental sustainability in the context of channeling funds based on Sharia principles. **Research Methods:** The methods used in this study include literature analysis to understand the concepts and theories related to green financing in Islamic banking and analysis of financial statements of PT BSI and PT BCA Syariah to explore the implementation of green financing in these institutions. **Results:** This study identifies the extent to which Islamic banks in Indonesia have adopted the green financing paradigm, the factors that influence its implementation, and its impact on environmental and social sustainability in Indonesia. **Conclusion:** This research is expected to provide an in-depth understanding of the role of Islamic banking in supporting sustainable development, particularly in the environmental context in Indonesia. The results are expected to be the basis for policy development supporting green financing growth in the Islamic banking sector.

---

DOI: [10.21154/niqosiya.v4i01.3753](https://doi.org/10.21154/niqosiya.v4i01.3753)

Page: 193-203

---

---

Niqosiya with CC BY license. Copyright © 2024, the author(s)

---

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan sektor industri adalah pencapaian terbesar di abad ke-21. Komunitas global memproduksi dalam skala besar, menghasilkan output yang signifikan, terutama di bidang ekonomi. Namun demikian, dampak globalisasi ekonomi memicu problem lingkungan. Kekhawatiran tentang bagaimana tren globalisasi dapat membahayakan lingkungan secara lokal dan global semakin meningkat. Lebih lanjut, berbagai kajian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan jangka panjang diperburuk oleh globalisasi ekonomi, politik, dan sosial (Primbetova, Sharipov, Allayarov, & Haq, 2022).

Sebagaimana studi WHO (World Health Organization) yang menyebut persoalan lingkungan, khususnya udara. Berdasarkan data WHO, Sembilan dari sepuluh orang di dunia telah menghirup udara dengan kadar polutan tinggi. Selain itu, peningkatan suhu sebagai dampak perubahan iklim menjadi salah satu tuntutan masyarakat internasional untuk segera diatasi sebagai upaya mencegah degradasi lingkungan (Diaz, Putri, & Kwan, 2023).

Oleh karena itu, sebagai wujud komitmen bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban setiap manusia dan pemangku kebijakan di berbagai negara, maka dibutuhkan peran aktif berbagai pihak. Salah satu sektor yang harus berkontribusi dalam mewujudkan kelestarian lingkungan adalah perbankan. Perbankan sebagai entitas bisnis merupakan jantung perekonomian bangsa, karena 80 persen sektor ekonomi di dominasi oleh praktik sektor jasa keuangan di perbankan (Diaz et al., 2023).

Dengan demikian, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter yang memiliki kewenangan dan penentu kebijakan sektor perbankan, harus turut mengembangkan instrumen pasar keuangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mendorong pembiayaan ekonomi di Indonesia. Perwujudan keuangan berkelanjutan dapat dilakukan oleh lembaga perbankan melalui gerakan yang dikenal dengan istilah green banking (Diaz et al., 2023).

Isu keuangan berkelanjutan merupakan salah satu dari 6 isu prioritas di bidang keuangan yang dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia. Isu keuangan berkelanjutan terkait dengan upaya pengembangan sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim (sustainable finance), termasuk di dalamnya mengatasi risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon. G20 merupakan forum kerja sama multilateral yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif (<https://www.bi.go.id>, 2023).

Menurut Destry Damayanti, Deputy Gubernur Senior BI, bahwa untuk mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan nasional keuangan berkelanjutan yang komprehensif, seluruh stakeholders harus berkolaborasi, bersinergi, dan bekerjasama. Momentum sinergitas dan kerjasama antar otoritas perlu diwujudkan sedini mungkin, sehingga tercipta ruang untuk memperkuat dan mengembangkan aspek fundamental dan infrastruktur ekosistem keuangan berkelanjutan (<https://www.bi.go.id/id/>, 2023).

Keharusan sektor keuangan dan perbankan mengadopsi green economy pada dasar bermuara pada tujuan keberlanjutan. Oleh karena itu, sektor perbankan syariah di Indonesia harus turut serta berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. Beberapa kebijakan yang

telah dirumuskan dalam mendorong green banking diantaranya, PBI No.8/21/PBI/2006, Surat edaran Bank Indonesia No.8/22/DPBs, serta Peraturan OJK No 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik.

Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip-prinsip keuangan Islam menekankan investasi etis yang bermanfaat bagi masyarakat dan menghindari kegiatan yang merugikan (Khan & Bhatti, 2020). Landasan etika ini selaras dengan tanggung jawab lingkungan, mendorong bank-bank Islam untuk mendukung proyek-proyek yang mempromosikan keberlanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Pembiayaan hijau hijau di perbankan syariah dengan demikian mewakili konvergensi inovasi keuangan inovasi keuangan dengan kesadaran lingkungan.

Di Indonesia, implementasi pembiayaan hijau oleh bank telah mendapatkan momentum dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia telah secara aktif mendukung inisiatif pembangunan berkelanjutan, termasuk pembiayaan hijau, sebagai bagian dari nasional (Omar & Sembiring, 2019). Bahkan kajian Avivah (2023) dan Nasution (2018) menunjukkan peran proaktif bank dalam mendukung keuangan hijau, dengan Avivah menyoroti komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan Nasution membahas tanggung jawab bank dalam mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan. Namun, dalam kajian Hasanah (2022) menemukan bahwa implementasi keuangan hijau belum memiliki dampak positif pada profitabilitas bank syariah, sehingga menunjukkan perlunya penelitian dan pengembangan lebih lanjut di bidang ini. Lebih lanjut Alfarizi (2023) menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan dan komitmen syariah dalam mendorong kinerja berkelanjutan bank syariah melalui keuangan hijau. Studi-studi ini secara kolektif menyoroti potensi perbankan syariah dalam memajukan keuangan hijau di Indonesia, sekaligus menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan dampaknya.

Berbagai kajian tersebut secara kolektif menunjukkan bahwa isu sustainable financing maupun green banking menjadi penting untuk menjadi prioritas dengan menghadirkan model-model kebijakan yang inklusif yang memprioritaskan keberlanjutan dan keadilan sosial, tidak terkecuali di Indonesia. Dengan mengambil fokus kebaruan kajian, artikel ini memiliki distingsi pada eksplorasi paradigma green financing di perbankan syariah dan implementasi green financing di perbankan syariah di Indonesia, khususnya PT BSI dan BCA syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kualitatif. Pilihan terhadap studi kualitatif bertujuan untuk menggali dan mengeksplorasi data dalam konteks sosial yang natural (Sugiyono, 2014). Penggalan data dilakukan terhadap sumber sekunder yang terkait dengan pembiayaan hijau pada sektor perbankan syariah. Sumber data sekunder berdasarkan laporan keberlanjutan PT Bank Syariah Indonesia dan PT Bank BCA Syariah. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan, observasi sumber online. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian, Sementara observasi dilakukan terhadap sejumlah

situs dan laporan keberlanjutan perbankan untuk mengetahui dan memperoleh informasi dan deskripsi terkait pembiayaan hijau. Sedangkan terkait pemilihan sumber dokumen penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling (Miles & Huberman, 1992).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Paradigma green financing dalam perbankan syariah di Indonesia

Sustainable financing atau keuangan berkelanjutan dapat dipahami sebagai dukungan yang holistik industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Konsep ini berfokus pada integrasi faktor-faktor keberlanjutan dalam manajemen keuangan, investasi, dan keputusan bisnis. Green financing tidak dapat dilepaskan dari konsep sustainable banking. Menurut Jeucken dapat diidentifikasi dari segi manajemen investasi, manajemen deposito, pembangunan SDM, CSR dan kesadaran nasabah (Handajani, Rifai, & Husnan, 2019).

BSI dan BCAS berkomitmen untuk mengimplementasikan sustainable finance and banking yang memegang teguh prinsip keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan demi mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam menerapkan tata Kelola perusahaan yang baik, BSI mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/ PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maupun peraturan terkait lainnya. Kebijakan Tata Kelola telah disahkan melalui persetujuan Dewan Komisaris pada lembar persetujuan Surat No. 01/001/-3/DIR-PPG tanggal 1 Februari 2021 dan surat keputusan Dewan Komisaris mengenai pilar kebijakan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, bisnis, operasional, dan pengendalian. Kebijakan ini menjadi landasan bagi seluruh unit kerja dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam peningkatan Tata Kelola, BSI akan menyusun ketentuan internal tentang pelaporan Taksonomi Hijau Indonesia, sebagai antisipasi terbitnya POJK tentang Taksonomi Hijau. Implementasi Taksonomi Hijau Indonesia, selaras dengan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025) (Laporan Keberlanjutan 2023, PT BSI).

Sejalan dengan maqoshid syariah, BSI berkomitmen untuk mengimplementasikan *sustainable finance and banking* yang memegang teguh prinsip keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan demi mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Implementasi sustainable finance and banking BSI bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pertumbuhan bisnis, kebaikan serta manfaat untuk umat dan nasabah, kesejahteraan lingkungan dan masyarakat secara luas, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam pelaksanaannya, BSI terus mendukung prinsip “People & Planet”, yang bermakna bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, harus senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan, serta memberikan nilai tambah yang bermanfaat untuk kebaikan dunia dan juga akhirat (rahmatan lil alamin) (Laporan Keberlanjutan 2023, PT BSI).

Dalam melaksanakan aksi keuangan berkelanjutan, BSI memiliki pedoman Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Dokumen RAKB 2023 menggambarkan Rencana kegiatan keuangan berkelanjutan selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023, dan 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai 2025, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan implementasi kegiatan keuangan berkelanjutan selama 5 (lima) tahun, Bank melakukan sinkronisasi target dan strategi yang tercantum pada Corporate Plan dan Rencana Bisnis Bank (RBB) (Laporan Keberlanjutan 2023, PT BSI).

Dalam laporan kinerja ekonomi BSI berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK dengan cara meningkatkan efisiensi energi di gedung-gedung Bank, mengganti kendaraan operasional dengan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, serta mempromosikan gaya hidup rendah karbon dan ramah lingkungan di antara karyawan. BSI berkomitmen untuk menggunakan sumber daya alam dengan bijak dan mengoptimalkan penggunaannya. Bank juga akan mempromosikan penghematan energi dan air di antara karyawan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya alam (Laporan Keberlanjutan 2023, PT BSI).

Strategi Keberlanjutan yang dilakukan oleh Bank BCA Syariah berlandaskan pada Maqashid syariah. Dalam falsafah maqashid syariah, selaras dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan di mana Keuangan Berkelanjutan bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang turut menjaga keseimbangan aspek *Environment, Social and Governance* (ESG) atau Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) dan mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Komitmen BCAS dalam mewujudkan implementasi keberlanjutan melalui penyusunan Kebijakan dan Strategi Keuangan Berkelanjutan pada tahun 2022 yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2023. Pada tahun 2023, telah menyusun action plan implementasi Kebijakan dan Strategi Keuangan Berkelanjutan. Kebijakan dan strategi tersebut menjadi pedoman bagi BCAS dalam mengoptimalkan kinerja Keuangan Berkelanjutan. Dalam upaya mendukung green financing BCAS mempunyai visi yaitu menjadi Bank Syariah andalan dan pilihan masyarakat, selaras dengan pembangunan berkelanjutan Indonesia. BSI memiliki misi yaitu senantiasa menyelaraskan kegiatan usaha perusahaan dengan Prinsip Keuangan Berkelanjutan (Laporan Keberlanjutan 2023, PT BCAS).

BCAS mengembangkan peta jalan (*roadmap*) implementasi Keuangan Berkelanjutan lima tahun (2023–2028) yang memperlihatkan milestone pencapaian dalam tiga fase. Fase I (2023-2024) Memperkuat tata kelola keberlanjutan dan Penyesuaian organisasi BCAS melalui penguatan tugas pokok dan fungsi ESG. Fase II (2025-2026) Mengimplementasikan strategi Keuangan Berkelanjutan yang berdampak bagi peningkatan portofolio KUBL. Fase III (2027-2028) Menjalankan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan nilai dan portofolio bisnis yang sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan (Laporan Keberlanjutan 2023, PT BCAS).

Kegiatan Prioritas Pencapaian Target Keuangan Berkelanjutan BCAS: 1) Prioritas Penyediaan Pembiayaan dan Inovasi Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan; 2) Akuisisi calon nasabah pembiayaan pada KUB, Investasi pada instrumen investasi yang sejalan dengan

keuangan berkelanjutan, Membuat skema produk dana terkait ESG. 3) Prioritas Pengembangan Kapasitas Internal. Internalisasi dan edukasi keuangan berkelanjutan secara berkesinambungan kepada karyawan dan nasabah. 4) Prioritas Penyesuaian Organisasi Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan Standar Prosedur Operasional (SPO). Memperkuat tugas pokok dan fungsi ESG dalam struktur organisasi, Menyusun Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator/KPI*) terkait keuangan berkelanjutan, Menyusun panduan teknis untuk integrasi risiko ESG dalam analisis pembiayaan; 5) Program Lainnya yang Mendukung Keuangan Berkelanjutan. Membuat *sustainability dashboard* yang terintegrasi dari aspek operasional dan bisnis, Membuat alat pencatatan dan pengukuran untuk konsumsi sumber daya, Menggunakan produk hemat energi dalam operasional kantor.

### **Implementasi *green financing* dalam perbankan syariah di Indonesia**

Pembiayaan berkelanjutan melibatkan pertimbangan aspek berikut: Pertama, aspek lingkungan. Penilaian dampak lingkungan dari suatu proyek atau investasi. Hal ini dapat mencakup pengurangan emisi karbon, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, dan kebijakan yang mendukung konservasi alam. Kedua, aspek Sosial. Fokus pada dampak sosial dari proyek atau investasi, termasuk dukungan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Ketiga, aspek ekonomi. Penilaian dampak ekonomi jangka panjang, termasuk kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, tata Kelola. Mempertimbangkan praktik tata kelola perusahaan atau proyek, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar etika ([Handajani, Rifai, & Husnan, 2019](#)).

Pembiayaan berkelanjutan dapat mencakup berbagai instrumen keuangan, seperti obligasi hijau, obligasi sosial, dan pinjaman berkelanjutan, yang dirancang untuk mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan. Perbankan berkelanjutan, investasi sosial dan lingkungan hidup, serta praktik keuangan yang bertanggung jawab semakin mendapat perhatian di dunia keuangan.

Dalam implementasinya, BSI telah menerapkan visi misi keuangan berkelanjutan. Adapun visinya adalah Menjadi Top 5 bank di Indonesia berdasarkan implementasi keuangan berkelanjutan dalam waktu 5 tahun. Sedangkan misinya yaitu memberikan akses keuangan berkelanjutan di Indonesia dengan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, menjadi bank yang memberikan kontribusi terbaik kepada ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dengan menjadi top 5 bank di Indonesia dalam hal rasio pembiayaan berkelanjutan dan implementasi CSR untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat luas. Menjadi perusahaan yang memberdayakan seluruh pegawai agar memiliki kesadaran dan perhatian dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan pada operasional perbankan (Laporan Keberlanjutan 2023, PT BSI).

BSI dalam meningkatkan aktivitas keuangan berkelanjutan berdasarkan 3 pilar, yaitu *Sustainable Banking*, *Sustainable Operation*, dan *Sustainable CSR*, serta *Financial Inclusion*. Ini sesuai dengan tujuan BSI yaitu tumbuh positif dengan menjadi mitra finansial, sosial, dan spiritual masyarakat. Pertumbuhan positif *green financing*, meningkatnya *green activity*, serta

implementasi green economy yang berasaskan maqashid syariah telah memberikan nilai positif tersendiri bagi perbankan syariah.

Pembiayaan berkelanjutan atau usaha berwawasan lingkungan BSI dijalankan berdasarkan kriteria dan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) yang ditetapkan oleh OJK dalam Pedoman Teknis POJK No. 51/POJK.03/2017. Berdasarkan pedoman tersebut, BSI melakukan identifikasi pembiayaan berkelanjutan yang terdiri dari pembiayaan UMKM dan portofolio hijau non-UMKM. BSI juga memiliki *Corporate Plan* (Corplan) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang menjadi panduan dalam menyusun RAKB dan Rencana Bisnis Bank (RBB), termasuk dalam menyusun program prioritas keuangan berkelanjutan. Dokumen ini mengatur prosedur proses pembiayaan kepada debitur dengan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan (Laporan Keberlanjutan 2023, PT BSI).

BSI telah memulai komitmennya melalui penerapan budaya ramah lingkungan untuk menciptakan *green office* dan mengimplementasikan keuangan berkelanjutan untuk mendukung pembiayaan berwawasan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, BSI menciptakan program dan inisiatif yang mampu memberikan dampak positif kepada lingkungan, mulai dari meningkatkan efisiensi penggunaan energi, air, penghematan kertas, serta mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Selain melaksanakan serangkaian kegiatan green campaign, guna mewujudkan inisiatif yang ada, Bank juga telah melakukan berbagai inovasi dalam aksi hijau, seperti transisi energi bersih, merealisasikan langkah produksi yang rendah emisi, pembiayaan berkelanjutan, dan lain-lain (Laporan Keberlanjutan 2023, PT BSI).

Komitmen BSI dalam melaksanakan implementasi keuangan berkelanjutan salah satunya dibuktikan melalui peluncuran Gerakan Berkelanjutan BSI. Program ini merupakan gerakan ajakan BSI bagi seluruh masyarakat Indonesia agar dapat berkontribusi positif bagi kelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Gerakan Berkelanjutan BSI meliputi 3 poin aktivitas utama, yaitu penarikan sampah plastik melalui penyediaan mesin penjual otomatis atau mesin drop botol plastik digital yang selanjutnya akan didaur ulang menjadi aneka produk serbaguna yang diproduksi oleh UMKM, menyimpan pohon serta menyimpan tukik anak untuk pemeliharaan. Dalam pelaksanaannya, berkolaborasi dengan Plasticpay melakukan 50 Reverse Vending Machine (RVM) di Bali dan Jabodetabek. Melalui inovasi ini, masyarakat dapat menukarkan botol plastik menjadi uang. Selanjutnya, botol plastik yang telah terkumpul dapat didaur ulang menjadi produk serbaguna yang diproduksi oleh UMKM Indonesia. Melalui proses tersebut, berharap penerapan prinsip 3P (*People, Planet, Profit*) dalam keuangan berkelanjutan dapat diterapkan dengan baik. Sehingga, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan, sekaligus mengenalkan keuangan berkelanjutan kepada masyarakat (Laporan Keberlanjutan 2023, PT BSI).

Sedangkan BCAS memaknai nilai keberlanjutan sebagai upaya berkesinambungan untuk menyelaraskan aktivitas perbankan dengan aspek ESG dan maqashid syariah agar tercapai visi keberlanjutan. Upaya itu diwujudkan melalui tiga pilar kebijakan, yakni (1) perbankan syariah yang berkelanjutan, (2) institusi yang kontributif dan bertanggung jawab, serta (3) sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan sejahtera (Laporan Keberlanjutan 2023, PT BCAS).

BCAS menyempurnakan proses seleksi dalam penyaluran pembiayaan sebagai wujud pengelolaan risiko penerapan Keuangan Berkelanjutan melalui penyusunan Analisis Risiko Lingkungan dan Sosial (*Environmental & Social Risk Analysis/ESRA*) untuk nasabah pembiayaan secara bertahap. Pedoman ESRA akan diimplementasikan secara bertahap mulai tahun 2024 dan menjadi rujukan dalam melakukan analisis penyaluran pembiayaan pada sektor industri melalui analisis risiko ESG (Laporan Keberlanjutan 2023, PT BCAS).

Dalam Kinerja Pembiayaan Berkelanjutan BCAS menyalurkan pembiayaan pada proyek-proyek yang termasuk kegiatan usaha berkelanjutan (KUB) sebesar 30,1% dari total pembiayaan tahun 2023. Total pembiayaan KUB yang disalurkan mencapai Rp2,7 triliun dengan komposisi portofolio sebesar Rp894,0 miliar untuk pembiayaan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Rp1,8 triliun untuk UMKM. Angka ini menunjukkan pertumbuhan 4,7% dibandingkan tahun sebelumnya (Year on Year/YoY). Total terdapat 6 sektor KUBL yang dibiayai, yaitu bidang usaha efisiensi energi, eco-efficient, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, serta transportasi ramah lingkungan. Mayoritas pembiayaan KUBL disalurkan kepada proyek bertujuan efisiensi energi yakni mencapai Rp367,7 miliar. Sebagai wujud kontribusi pada pembangunan rendah karbon, BCAS memetakan nasabah pembiayaan berdasarkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI). Persiapan implementasi dilakukan melalui penyesuaian kebijakan dan prosedur, serta metode asesmen risiko ESG untuk para nasabah pembiayaan dengan sektor usaha yang memiliki dampak lingkungan yang tinggi. Sesuai target, pada 2023 BCAS telah melakukan pemetaan terhadap 250 nasabah utama sesuai THI (Laporan Keberlanjutan 2023, PT BCAS).

Pada periode pelaporan, BCAS telah menyusun strategi implementasi Keuangan Berkelanjutan yang sudah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan Direksi melalui penerbitan Surat Keputusan No. 042/SK/DIR/2023 perihal Kebijakan dan Strategi Keuangan Berkelanjutan BCA Syariah. Kebijakan dan strategi tersebut memuat sejumlah inisiatif yang terangkum dalam empat kegiatan prioritas yang bertujuan untuk mencapai target penerapan Keuangan Berkelanjutan. Dalam menetapkan prioritas implementasi Keuangan Berkelanjutan, menyesuaikannya dengan Kebijakan dan Strategi Keuangan Berkelanjutan yang telah disusun. Secara umum, sebagian besar target implementasi sebagaimana tercantum di dalam RAKB tahun 2023 dapat direalisasikan dengan baik (Laporan Keberlanjutan 2023, PT BCAS).

Penilaian Risiko Implementasi Keuangan Berkelanjutan, BCAS mengelola risiko penerapan Keuangan Berkelanjutan (KB) melalui identifikasi dan analisis dampak implementasi Keuangan Berkelanjutan terhadap aktivitas dan reputasi Bank, pemangku kepentingan, serta lingkungan. Pengelolaan risiko tersebut juga mencakup risiko ESG yang berkaitan dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan. BCAS menyiapkan strategi mitigasi dampak serta mekanisme pemantauan dan evaluasinya. Departemen Pengelolaan Keberlanjutan Ekonomi, Sosial & Lingkungan, Komunikasi Korporasi dan Kesekretariatan sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan implementasi Keuangan Berkelanjutan menyampaikan hasil implementasi kepada Direksi saat proses penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan



secara tahunan. Monitoring dan evaluasi pengelolaan risiko implementasi Keuangan Berkelanjutan melibatkan Direktur (Laporan Keberlanjutan 2023, PT BCAS).

Risiko penerapan Keuangan Berkelanjutan terutama terletak pada pembiayaan sehingga pemetaan risiko dan sistem mitigasi aspek ESG dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan terutama dilakukan pada proses penyaluran pembiayaan. Assessment atas risiko pembiayaan, termasuk di dalamnya risiko ESG, dilakukan oleh Satuan Kerja Analisis Risiko Pembiayaan melalui proses analisis kelayakan nasabah dan usaha nasabah. Sementara dalam penyusunan kebijakan, penilaian risiko melalui mekanisme stress test dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko. Salah satu bentuk pemetaan risiko juga dilakukan melalui pemetaan pembiayaan berdasarkan ketentuan Regulator mengenai THI. Saat ini 250 nasabah utama telah dipetakan dengan berpedoman pada THI. Hasil pemetaan memberikan wawasan bagi mengenai portofolio penyaluran pembiayaan saat ini berdasarkan risiko usaha nasabah pembiayaan terhadap dampak lingkungan (Laporan Keberlanjutan 2023, PT BCAS).

Pembiayaan Keuangan Berkelanjutan BCA Syariah telah mengklasifikasikan pembiayaan yang disalurkan ke dalam 12 kategori KUB. Pada tahun ini berhasil menambah satu sektor penyaluran pembiayaan KUBL menjadi enam sektor.

Alur Pemetaan Pembiayaan Berdasarkan Kategori KUB, sebagai berikut:

1. Identifikasi UMKM atau non-UMKM

Nasabah yang termasuk ke dalam UMKM secara otomatis tergolong dalam KUB ke-12, yakni Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain Dari Kegiatan UMKM.

2. Identifikasi bidang usaha

Jika seluruh/mayoritas bidang usaha termasuk kegiatan usaha berkelanjutan maka dikategorikan dalam KUB ke 1-11.

3. Identifikasi tujuan penggunaan pembiayaan

Jika bidang usaha tidak termasuk kategori KUB tetapi tujuan penggunaan pembiayaan termasuk KUB, maka akan dikategorikan dalam KUB ke 1-11.

BCA Syariah melakukan pengembangan *Core Banking System* (CBS) khususnya pada modul pembiayaan untuk mengakomodir klasifikasi pembiayaan terkait THI guna mempermudah identifikasi pembiayaan Keuangan Berkelanjutan, maupun penyajian data secara akurat yang dibutuhkan oleh pembuat keputusan dan pemangku kepentingan BCA Syariah. BCA Syariah memiliki fungsi intermediasi yang berperan signifikan dalam menyediakan dan mengembangkan solusi keuangan yang menunjang pembangunan berkelanjutan. BCA Syariah berupaya untuk merespons dampak perubahan iklim dengan cara melakukan akselerasi penyaluran pembiayaan kepada sektor usaha berwawasan lingkungan.

Dukungan pada mitigasi perubahan iklim terus diserukan oleh regulator. Merespon hal ini dengan terus meningkatkan pemahaman pentingnya risiko iklim yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan di antaranya dengan melakukan sosialisasi maupun pelatihan mengenai implementasi ESRA serta pemetaan pembiayaan berdasarkan kategori THI di lingkungan organisasi BCA Syariah maupun kepada nasabah pembiayaan. Walaupun belum menghitung dampak negatif risiko iklim, BCA Syariah mulai secara bertahap melakukan identifikasi risiko yang paling berdampak pada kelangsungan usaha melalui pemetaan

pembiayaan yang berdasarkan risiko terhadap lingkungan BCA Syariah menyalurkan pembiayaan KUB.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dalam tulisan ini dapat disimpulkan: Pertama, Paradigma *green financing* perbankan syariah di Indonesia pada PT BSI dan PT BCAS yaitu mewujudkan *sustainable finance and banking* yang memegang teguh prinsip keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Strategi Keberlanjutan yang dilakukan oleh BSI dan BCA Syariah berlandaskan pada Maqashid syariah. Dimana falsafah maqashid syariah selaras dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang turut menjaga keseimbangan aspek *Environment, Social and Governance* (ESG) atau Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) dan mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam melaksanakan aksi keuangan berkelanjutan, BSI memiliki pedoman Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Sedangkan BCAS mempunyai peta jalan (*roadmap*) implementasi Keuangan Berkelanjutan. Pembiayaan berkelanjutan melibatkan pertimbangan aspek berikut: Pertama, aspek lingkungan. Kedua, aspek Sosial. Ketiga, aspek ekonomi. Kedua, Dalam implementasinya, BSI Syariah telah menerapkan aktivitas keuangan berkelanjutan berdasarkan 3 pilar, yaitu *Sustainable Banking, Sustainable Operation, dan Sustainable CSR*, serta *Financial Inclusion*. Ini sesuai dengan tujuan BSI yaitu tumbuh positif dengan menjadi mitra finansial, sosial, dan spiritual masyarakat. Pertumbuhan positif *green financing*, meningkatnya *green activity*, serta implementasi *green economy* yang berasaskan maqashid syariah telah memberikan nilai positif tersendiri bagi perbankan syariah. Sedangkan BCA Syariah mengimplementasikan keuangan keberlanjutan diwujudkan melalui tiga pilar kebijakan, yakni (1) perbankan syariah yang berkelanjutan, (2) institusi yang kontributif dan bertanggung jawab, serta (3) sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan sejahtera. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan *green financing* di sektor perbankan syariah serta memberikan wawasan kepada praktisi, akademisi, dan pengambil kebijakan tentang potensi dan tantangan dalam mengimplementasikan *green financing* di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia.

## **REFERENSI**

- Alfarizi, M., Hanum, R. K., Firmansyah, A. A., & Sari, R. K. (2023). Implikasi Komitmen Kepemimpinan Islam dan Dimensi Green Finance dalam Mendorong Kinerja Berkelanjutan Perbankan Syariah Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v10i2.7164>
- Avivah, I. N., & Muharrami, R. S. (2023). The Contribution of Islamic Banking in Supporting the Creation of Green Finance in Indonesia. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 7(2), 282-294. <https://doi.org/10.37726/ee.v7i2.951>

- Cahyani, Y. T., Santoso, L., & Ma'mun, S. (2023). Budgeting From an Islamic Green Economy Perspective in Local Development. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 3(2), 236–263. <https://doi.org/10.21154/invest.v3i2.7542>
- Diaz, M. R., Putri, J. K., & Kwan, H. (2023). Penerapan Pembiayaan Green Banking Atas Ide Proposal Hijau Generasi Muda di Sektor UMKM. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, 4(1), 95. <https://doi.org/10.19184/idj.v4i1.39525>
- Handajani, L., Rifai, A., & Husnan, L. H. (2019). Study of The Initiation of Green Banking Practices at State-owned Bank. *Jurnal Economia*, 15(1), 1–16. <https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.21954>
- Ilham, M. I. (2021). Economic Development and Environmental Degradation in Indonesia: Panel Data Analysis. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 22(2), 185–200. <https://doi.org/10.18196/jesp.v22i2.7629>
- Keho, Y. (2023). Does Globalization Cause Environmental Degradation in Developing Economies? Evidence from Cote d'Ivoire Using Ecological Footprint. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(4), 455–466. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14325>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Primbetova, M., Sharipov, K., Allayarov, P., & Haq, I. U. (2022). Investigating the Impact of Globalization on Environmental Degradation in Kazakhstan. *Frontiers in Energy Research*, 10, 896652. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2022.896652>
- Putri, N. S., Handayani, T., Sulistyani, W., & Sukarda, H. M. (2023). Peran Perbankan Dalam Pengawasan Pembiayaan Korporasi (Sektor Hijau). *Warta Pengabdian*, 17(1), 47. <https://doi.org/10.19184/wrtp.v17i1.37046>
- Savitri Dewi, L. (2022). Peranan Perbankan Dalam Mendukung Green Economy Melalui Program Green Financing. Dalam *Strategi Pengembangan Kinerja Koperasi dan UMKM*. Jatinangor: Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2008). *Globalisasi Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*. Diambil dari <https://www.semanticscholar.org/paper/Globalisasi-Peluang-atau-Ancaman-bagi-Indonesia>